

Panduan Transisi Berkeadilan

Menuju Jalur Transisi Energi Berkeadilan serta Masa Depan yang Inklusif dan Berkelanjutan.

CAN International



Juni, 2025

Just Energy Transition in Coal Regions



Panduan Transisi Berkeadilan: Menuju Jalur Transisi Energi Berkeadilan serta Masa Depan yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Proyek Innovation Regions for a Just Energy Transition didanai bersama oleh Kementerian Federal Jerman untuk Urusan Ekonomi dan Aksi Iklim (BMWK) melalui International Climate Initiative (IKI), serta oleh Direktorat Jenderal Kemitraan Internasional Komisi Eropa (DG INTPA) untuk Just Energy Transition in Coal Regions Interregional Platform (JET-CR). Proyek ini dilaksanakan oleh konsorsium organisasi yang dipimpin oleh GIZ sebagai Koordinator Proyek bersama, dengan Climate Action Network (CAN), International Institute for Sustainable Development (IISD), International Labour Organization (ILO), Wuppertal Institute für Klima, Umwelt, Energie GmbH, Solidarity Center, dan APHEDA sebagai mitra pelaksana.

IKI JET dan Platform JET-CR bertujuan mendukung serta mempercepat transisi energi yang berkeadilan dari batu bara menuju energi terbarukan dan kegiatan ekonomi berkelanjutan lainnya di Kolombia, Chile, Afrika Selatan, Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Mongolia.

Just Energy Transition in Coal Regions (JET-CR) Knowledge Hub merupakan platform daring yang menjembatani para ahli, pembuat kebijakan, industri batu bara, serikat pekerja, dan organisasi masyarakat sipil. Platform ini menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai sudut pandang, berbagi kisah nyata, serta mencari perangkat dan solusi yang efektif.

Platform ini secara khusus bertujuan memperkuat suara para pekerja dan komunitas yang bergantung pada batu bara dengan menunjukkan bagaimana pengetahuan dapat diterapkan dalam praktik. Selain itu, platform ini juga mengubah praktik menjadi pengetahuan dengan membawa pengalaman lokal ke dalam diskusi global serta mendorong pengembangan keahlian mengenai transisi energi yang berkeadilan.

Dengan menyediakan ringkasan rutin berupa artikel, hasil penelitian, berita, dan berbagai kegiatan, platform ini berfungsi sebagai “pusat informasi terpadu” (one-stop shop) untuk menghimpun informasi terkini terkait transisi energi yang berkeadilan dari batu bara di berbagai belahan dunia.

On behalf of:



of the Federal Republic of Germany



Publikasi ini disusun dengan dukungan pendanaan dari International Climate Initiative milik Kementerian Federal Jerman untuk Urusan Ekonomi dan Aksi Iklim (BMWK) serta Uni Eropa berdasarkan Perjanjian Hibah dengan GIZ. Seluruh isi publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab para penulis dan tidak serta-merta mencerminkan pandangan BMWK, Uni Eropa, maupun GIZ.

Panduan Transisi Berkeadilan: Menuju Jalur Transisi Energi Berkeadilan serta Masa Depan yang Inklusif dan Berkelanjutan.

© 2025 Climate Action Network International

Diterbitkan oleh Just Energy Transition for Coal Regions Knowledge Hub

Publikasi ini dilisensikan di bawah Lisensi [Internasional Creative Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0.](#)

Tentang Climate Action Network International

CAN merupakan jaringan global organisasi anggota nirlaba non-pemerintah dari berbagai negara di dunia yang berkomitmen untuk memerangi perubahan iklim yang merusak serta mendorong keadilan dan kesetaraan iklim. CAN memiliki pengalaman selama lebih dari 30 tahun dalam mempertemukan organisasi masyarakat sipil untuk merumuskan dan mengembangkan strategi bersama, prioritas, serta agenda kebijakan terkait. Sebagai organisasi pemangku kepentingan yang berfokus pada masyarakat sipil dan komunitas, CAN memiliki pengetahuan dan pengalaman mendalam dalam menghadirkan suara masyarakat sipil ke dalam proses kebijakan dan dialog terkait. CAN merupakan jaringan berbasis keanggotaan dengan lebih dari 1.500 organisasi anggota di seluruh dunia. CAN International Association E.V. adalah organisasi hukum yang dibentuk untuk mendirikan sekretariat yang mengoordinasikan kegiatan Node CAN dan para anggotanya di tingkat internasional. Sebagian besar anggota CAN berpartisipasi melalui Node Nasional dan Regional, sekaligus terlibat di tingkat internasional melalui CAN International bersama dengan berbagai Node tersebut. Melalui jaringan nasional dan organisasi masyarakat sipil yang tergabung di dalamnya, CAN telah aktif bekerja pada persimpangan antara upaya mendorong keadilan iklim dan keadilan sosial dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan serta mengatasi perubahan iklim melalui pengembangan energi terbarukan, penguatan mata pencaharian berkelanjutan, dan peningkatan peran masyarakat sipil. Pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh di tingkat nasional kemudian dibawa ke berbagai proses dan dinamika kebijakan internasional melalui CAN International. Dengan cara ini, pekerjaan di tingkat nasional dan regional dapat terhubung dengan ranah internasional, sekaligus memungkinkan terjadinya pertukaran pengalaman dan pembelajaran lintas wilayah di berbagai belahan dunia.

Kantor Pusat
Kaiserstr. 201,
Bonn, 53113,
Germany

www.climatenetwork.org
[x.com/CANIntl](https://twitter.com/CANIntl)

Panduan Transisi Berkeadilan: Menuju Jalur Transisi Energi Berkeadilan serta Masa Depan yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Juni 2025

CAN I.

Ucapan Terima Kasih

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang mendalam kepada seluruh komunitas akar rumput, organisasi masyarakat sipil, pekerja, peneliti, dan aktivis lokal yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Wawasan, pengalaman hidup, dan kejelasan perspektif mereka telah membentuk arah dan substansi panduan ini.

Panduan Transisi Berkeadilan: Menuju Jalur Transisi Energi Berkeadilan serta Masa Depan yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Kami secara khusus berterima kasih kepada mereka yang dengan tulus telah meluangkan waktu, berbagi pengalaman perjuangan, dan praktik-praktik terbaik—sering kali di tengah proses transisi yang kompleks di lapangan. Dokumen ini merupakan hasil dari pemikiran kolektif dan kerja sama dengan berbagai pihak yang berkomitmen untuk mendorong terwujudnya transisi yang adil dan berkelanjutan.

Ringkasan Eksekutif

Panduan ini dibuat berdasarkan visi yang luas dan transformatif mengenai Transisi yang Berkeadilan (Just Transition), yang dipahami sebagai proses sistemik menuju ekonomi dan masyarakat yang berkeadilan sosial, berkelanjutan secara lingkungan, serta berlandaskan kesetaraan dan kepedulian. Meskipun panduan ini menyediakan prinsip-prinsip umum dan landasan politik yang relevan bagi seluruh sektor yang sedang mengalami transformasi, panduan ini secara khusus ditujukan untuk mendukung pengembangan proses dan rencana Transisi Energi yang Berkeadilan (Just Energy Transition/JET). Panduan ini terutama relevan bagi proses yang dirancang dan dilaksanakan di tingkat nasional maupun lokal, di mana berbagai keputusan secara langsung memengaruhi pekerja, masyarakat, dan ekosistem. Dokumen ini berfungsi sebagai alat bagi organisasi masyarakat sipil, kelompok akar rumput, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk terlibat, memengaruhi, serta bersama-sama menciptakan proses transisi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, mendistribusikan kembali kekuasaan, dan mencerminkan realitas kelompok yang paling terdampak.

Dokumen ini disusun melalui proses partisipatif yang dilakukan dalam Jaringan CAN dan Komunitas Praktik IKI JET, dengan menggabungkan pengalaman, praktik terbaik, serta pandangan politik dari berbagai pihak, terutama dari negara-negara Global Selatan. Dokumen ini menjelaskan prinsip-prinsip utama keadilan—termasuk keadilan distribusi, prosedural, pemulihan, dan antar-generasi—sebagai dasar penting dalam setiap proses transisi. Selain itu, dokumen ini juga memberikan elemen penting dan rekomendasi kebijakan yang nyata untuk mewujudkan jalur Transisi Energi Berkeadilan (JET) yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini menekankan pentingnya partisipasi yang bermakna, pekerjaan yang layak, ekonomi berbasis kepedulian, perlindungan sosial, serta solidaritas internasional. Alih-alih menawarkan satu model yang baku, panduan ini menyediakan kerangka yang fleksibel dan terus berkembang untuk menginspirasi serta mendukung proses transisi yang berlandaskan kondisi nyata masyarakat, dipimpin oleh komunitas, dan berpusat pada keadilan—dimulai dari sektor energi, namun dapat diterapkan lebih luas di berbagai sektor lainnya.

Panduan Transisi Berkeadilan: Menuju Jalur Transisi Energi Berkeadilan serta Masa Depan yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Daftar isi

Ringkasan Eksekutif	4
Daftar isi.....	5
Singkatan dan Akronim.....	6
1.0 Pendahuluan.....	8
1.1 Apa tujuan dokumen ini?	8
1.2 Transisi yang berkeadilan menuju tatanan seperti apa dan ke arah mana?	9
2. Konsep Keadilan yang mendasari Aspek “Berkeadilan” dalam Transisi	11
3. Prinsip-prinsip yang memandu penerapan Transisi yang Berkeadilan: Unsur-unsur utama untuk proses dan rencana Transisi yang Adil dan Inklusif	14
4. Dari Prinsip ke Praktik: kebijakan dan tuntutan apa yang dapat mewujudkannya?	17
5. Refleksi akhir: Menuju rencana Transisi Energi Berkeadilan yang Inklusif dan berpihak pada masyarakat ..	24
Daftar Pustaka	25

Singkatan dan Akronim

CAN	Jaringan Aksi Iklim (Climate Action Network)
CAN I	Jaringan Aksi Iklim Internasional (Climate Action Network International)
Anggota CAN	Semua organisasi nirlaba, termasuk organisasi berbasis komunitas, yang tidak mewakili kepentingan pemerintah maupun industri serta secara aktif mendorong aksi iklim yang ambisius dan pembangunan berkelanjutan, berhak menjadi anggota CAN dan dapat mengajukan permohonan keanggotaan.
Node CAN	Node dibentuk untuk memungkinkan anggota meningkatkan kapasitas mereka dalam mencapai tujuan bersama dan mendorong perubahan yang dibutuhkan. Node Nasional adalah asosiasi anggota CAN di suatu negara tertentu. Node Regional adalah asosiasi anggota CAN dan/atau Node Nasional CAN di beberapa negara dalam lingkup internasional. Nama setiap Node harus mencerminkan secara memadai negara atau wilayah yang diwakilinya.
CDM	Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism)
CBO	Organisasi Berbasis Komunitas (Community-Based Organisation)
CMA	Konferensi Para Pihak yang bertindak sebagai Pertemuan Para Pihak pada Perjanjian Paris (Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement)
COP	Konferensi Para Pihak (Conference of the Parties)
CSO	Organisasi Masyarakat Sipil (Civil Society Organization)
FPIC	Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Free, Prior and Informed Consent)
GHG	Gas Rumah Kaca (Greenhouse Gas)
ILO	Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization)
IMF	Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund)
JET	Transisi Energi Berkeadilan (Just Energy Transition)
JT	Transisi Berkeadilan (Just Transition)
ODA	Bantuan Pembangunan Resmi (Official Development Assistance)

Panduan Transisi Berkeadilan: Menuju Jalur Transisi Energi Berkeadilan serta Masa Depan yang Inklusif dan Berkelanjutan.

SACAN	Jaringan Aksi Iklim Afrika Selatan (South African Climate Action Network)
SDGs	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)
TCA	Transisi Iklim dan Agroekologi (Transición Climática y Agroecología)
ULIP	Institut Universitas London di Paris (University of London Institute in Paris)
UNFCCC	Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change)
UNRISD	Institut Penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pembangunan Sosial (<i>United Nations Research Institute for Social Development</i>)
USCAN	Jaringan Aksi Iklim Amerika Serikat (United States Climate Action Network)
WEDO	Organisasi Perempuan untuk Lingkungan dan Pembangunan (Women's Environment and Development Organization)
WWF	Dana Dunia untuk Alam (World Wide Fund for Nature)

1.0 Pendahuluan

1.1 Apa tujuan dokumen ini?

Konsep Transisi Berkeadilan (Just Transition), Transisi Energi Berkeadilan (Just Energy Transition/JET), Transisi yang Adil dan Berkeadilan, dan istilah sejenisnya semakin sering digunakan, terkadang secara bergantian dan dengan maksud yang berbeda-beda. Misalnya, Transisi Energi Berkeadilan dapat digunakan untuk membahas transisi energi itu sendiri, termasuk tujuannya, tantangannya, dan kebijakannya. Istilah ini juga dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana sektor energi dapat diorganisasi ulang secara adil. Pola serupa juga dapat ditemukan dalam penggunaan istilah Transisi Berkeadilan di sektor lain. Untuk mengatasi kebingungan konseptual tersebut, dokumen ini bertujuan memberikan panduan bagi organisasi masyarakat sipil, komunitas, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam menjelaskan secara lebih tepat apa yang diperlukan untuk mewujudkan Transisi Berkeadilan di seluruh sektor yang sedang mengalami transformasi. Hal ini penting untuk memperoleh dukungan publik serta mencegah ketimpangan dan masalah sosial yang dapat terus berlanjut akibat kebijakan iklim. Oleh karena itu, dokumen ini tidak membahas secara rinci transisi sektor energi maupun sektor lainnya, tetapi tetap relevan bagi keduanya. Dokumen ini juga membantu membedakan ketika istilah Transisi Berkeadilan digunakan untuk mendorong keadilan—di mana pekerja dan komunitas menikmati hak mereka atas pekerjaan yang layak, kualitas hidup yang baik, dan lingkungan yang sehat—dengan situasi ketika istilah tersebut hanya digunakan untuk melakukan “social-washing” terhadap kebijakan yang sebenarnya tidak berubah dari praktik bisnis seperti biasa.

Namun demikian, konteks awal, kondisi, dan harapan berbagai komunitas dan masyarakat di seluruh dunia terhadap Transisi Berkeadilan sangat beragam. Oleh karena itu, penting untuk mengakui bahwa dinamika regional dan lokal dalam proses Transisi Berkeadilan memiliki implikasi terhadap tingkat pembangunan, mobilisasi sumber daya, kecepatan transisi, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya.

Panduan ini disusun berdasarkan pertukaran dan refleksi yang terjadi **di** dalam Jaringan CAN serta melalui Komunitas Praktik proyek IKI JET, di mana berbagai pihak berbagi pandangan tentang makna mewujudkan transisi yang adil secara sosial, berkelanjutan secara lingkungan, dan berkeadilan secara ekonomi. Alih-alih memberikan definisi yang baku atau cetak biru yang seragam, panduan ini mencerminkan hasil proses partisipatif yang berakar pada pengalaman nyata, pembelajaran, dan praktik terbaik. Dokumen ini bukan merupakan pedoman yang bersifat mengikat atau preskriptif, melainkan alat untuk mendukung partisipasi yang bermakna, menginspirasi aksi di tingkat lokal maupun nasional, serta membantu membentuk proses dan rencana Transisi Energi Berkeadilan (JET) yang menempatkan martabat manusia, demokrasi, dan keadilan sebagai pusat dalam perancangan maupun pelaksanaannya. Pada akhirnya, dokumen ini bertujuan untuk mendorong konvergensi—pertama di kalangan organisasi masyarakat sipil dan komunitas dalam Jaringan CAN, dan idealnya menjangkau komunitas yang lebih luas lagi—dengan menyatukan berbagai pihak yang bersedia mengorganisasi diri,

bermobilisasi, dan secara kolektif memperjuangkan Transisi Berkeadilan serta perubahan sistemik yang sangat kita butuhkan saat ini.

1.2 Transisi yang berkeadilan menuju tatanan seperti apa dan ke arah mana?

Kita hidup di dunia di mana model ekonomi yang dominan mendorong pertumbuhan material, akumulasi, dan konsumsi yang semakin mempercepat krisis iklim, merusak manusia dan ekosistem, serta menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam sistem ini, industri bahan bakar fosil merupakan salah satu pelaku utama pelanggaran tersebut.

Semakin jelas bahwa krisis iklim global sangat berkaitan erat dengan krisis ketimpangan global, di mana kelompok yang paling rentan dan paling sedikit berkontribusi terhadap emisi karbon justru menanggung beban terbesar akibat krisis iklim¹. Sifat ekstraktif dan eksploitatif dari sistem berbasis bahan bakar fosil yang saat ini berlaku menciptakan, melanggengkan, dan memperkuat ketimpangan yang mendalam baik antarnegara maupun di dalam negara, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap krisis iklim sekaligus membuat upaya penanganannya menjadi lebih sulit.

Agar kekacauan iklim dapat dihindari, banyak hal yang harus diubah dalam cara masyarakat dan ekonomi kita diorganisasi, termasuk nilai-nilai yang menjadi dasar pengorganisasiannya. Masyarakat yang dibangun atas pemenuhan hak asasi manusia dan hak ketenagakerjaan, serta komitmen untuk tetap berada dalam batas-batas ekologis planet, akan mengutamakan kesejahteraan dan membangun masyarakat yang berlandaskan kepedulian, di mana setiap orang dapat mengakses pekerjaan yang layak, kesehatan, perumahan, pendidikan, budaya, dan waktu luang. Kelompok masyarakat yang ideal adalah kelompok di mana hak-hak individu dan kolektif dihormati. Di mana solidaritas, keadilan, dan kesetaraan menjadi kekuatan pemandu dalam pengambilan keputusan. Di mana orang-orang kaya menunaikan tanggung jawab mereka secara adil dan para pencemar dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan yang mereka timbulkan.

Kami turut mendukung seruan Just Transition Alliance:

“Kita harus membangun suatu sistem ekonomi visioner yang sangat berbeda dari sistem yang kita jalani saat ini. Hal ini menuntut kita untuk menghentikan praktik-praktik yang merusak sekaligus membangun tatanan baru. Kita perlu mengubah aturan agar sumber daya dan kekuasaan dapat didistribusikan kembali kepada komunitas lokal. Inisiatif Transisi Berkeadilan mendorong peralihan dari energi kotor menuju demokrasi energi, dari pendanaan pembangunan jalan raya menuju perluasan transportasi publik, dari insinerator dan tempat pembuangan sampah terbuka menuju konsep nol limbah, dari sistem pangan industri menuju kedaulatan pangan, dari gentrifikasi menuju hak atas tanah bagi komunitas, dari kekerasan militer menuju penyelesaian damai, serta dari pembangunan destruktif yang tidak terkendali menuju pemulihan ekosistem. Inti dari Transisi Berkeadilan adalah demokrasi yang mendalam, di mana pekerja dan komunitas memiliki kendali atas keputusan-keputusan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Untuk membebaskan tanah dan juga

¹ Athanasiou T., Holz C., Kartha S. (2022). [Fair Shares: Lessons From Practice, Thoughts on Strategy](#)

Panduan Transisi Berkeadilan: Menuju Jalur Transisi Energi Berkeadilan serta Masa Depan yang Inklusif dan Berkelanjutan.

membebaskan jiwa kita, kita harus mendekolonisasi cara berpikir dan imajinasi kita, mengingat kembali arah jalan yang harus ditempuh, serta melepaskan diri dari kenyamanan sistem kekuasaan yang menindas. Kita harus percaya bahwa di dalam budaya dan warisan leluhur kita tersimpan beragam kebijaksanaan dan yang kita perlukan adalah dengan menuntun langkah menuju dunia yang dibangun atas hubungan yang adil, baik antar sesama manusia maupun dengan bumi tempat kita tinggal”².

Kami memandang Transisi Berkeadilan sebagai komponen penting untuk mewujudkan perubahan-perubahan tersebut dan memastikan bahwa proses tersebut berjalan sejalan dengan keadilan iklim, karena penyelenggaraan transisi secara adil merupakan jaminan untuk mencapai keadilan sosial sekaligus dalam upaya menghadapi perubahan iklim.

Kami memandang Transisi Berkeadilan sebagai salah satu pendorong utama (meskipun bukan satu-satunya) bagi terwujudnya keadilan iklim, bersama dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat Adat, keadilan antargenerasi, penghentian ekstraktivisme dan konsumsi berlebihan, keadilan gender, dan berbagai aspek lainnya.

Para pekerja melalui serikat pekerja mereka, pekerja informal dan pekerja rentan lainnya, kaum muda, kelompok penyandang disabilitas, komunitas miskin dan terpinggirkan, serta kelompok lainnya, selama ini secara historis dan tidak adil telah dikesampingkan dari pembahasan dan proses pengambilan keputusan terkait transisi yang memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan mereka. Bahkan, dalam beberapa kasus, mereka juga ditekan untuk mendukung struktur kekuasaan yang sudah ada. Dengan melibatkan para pemangku kepentingan utama tersebut dalam proses perundingan pengambilan keputusan dan dalam kepemimpinan bersama untuk pelaksanaan rencana mengenai masa depan mereka sendiri, Transisi Berkeadilan juga dapat membantu membangun kepercayaan dan dukungan yang lebih besar terhadap aksi iklim.

Sebagian besar perhatian terhadap Transisi Berkeadilan pada tingkat sektoral selama ini berfokus pada rantai nilai bahan bakar fosil (termasuk sektor ekstraksi dan pengguna sekundernya seperti industri otomotif dan industri berat). Kami berpandangan bahwa hak dan kebutuhan para pekerja serta komunitas juga harus diperhatikan dalam transformasi mendesak yang diperlukan di semua sektor produktif, seperti sektor pertanian dan pangan³.

² Climate Justice Alliance. [Just Transition: A Framework for Change](#).

³ Anderson, T. (2019). [Principles for a Just Transition in Agriculture](#). ActionAid.

Kotak 1. Pendekatan CAN

“Dunia yang Kita Inginkan” mengacu pada visi mengenai masyarakat dan sistem ekonomi yang telah mengalami transformasi mendalam—yakni sistem yang beroperasi dalam batas-batas ekologis planet, menjamin keadilan, serta melindungi hak dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Konsep ini menggambarkan tujuan yang ingin dicapai: sebuah sistem yang sepenuhnya telah ditransformasi dan sedang kita perjuangkan bersama, yaitu masa depan yang berlandaskan pada keadilan, kepedulian, dan solidaritas.

“Transisi Berkeadilan” merupakan konsep sekaligus pendekatan yang membantu kita memahami bagaimana mencapai dunia tersebut—yaitu bagaimana melakukan peralihan dari sistem yang ada saat ini menuju sistem yang lebih adil dan berkelanjutan, dengan tetap menjunjung tinggi keadilan sosial dan keadilan iklim. Pendekatan ini menempatkan manusia dan hak-haknya sebagai pusat dari setiap perubahan.

“Transisi Energi Berkeadilan” merupakan pembahasan khusus mengenai perjalanan transisi tersebut dalam sektor energi, dengan tetap mengakui bahwa perubahan di sektor energi membawa dampak yang sangat besar bagi sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan transisi yang berkeadilan dan mencakup seluruh sektor perekonomian.

2. Konsep Keadilan yang mendasari Aspek “Berkeadilan” dalam Transisi

Transisi Berkeadilan tidak berawal dari teori semata, melainkan dari praktik nyata, yaitu praktik para pekerja dan komunitas yang mengajukan tuntutan alternatif terhadap apa yang diharapkan oleh kelompok konservatif dari mereka: memilih antara pekerjaan dan mata pencaharian mereka atau perlindungan terhadap lingkungan dan kesehatan mereka. Konsep ini dimaksudkan untuk mencerminkan gagasan bahwa keamanan mata pencaharian pekerja harus menjadi prioritas utama dalam setiap pembahasan mengenai masa depan perekonomian, terutama dalam rangka mencapai tujuan lingkungan dan iklim. Meskipun pihak-pihak yang memiliki kekuasaan berupaya menjadikan pilihan tersebut seolah saling bertentangan demi mempertahankan status quo dan melanjutkan praktik pencemaran, kenyataannya kedua hal tersebut justru saling menguatkan. Sebab tidak akan ada lapangan pekerjaan di planet yang hancur, dan kita juga tidak akan mampu mempertahankan jalur pembatasan kenaikan suhu global hingga 1,5°C tanpa adanya Transisi Berkeadilan.

Meskipun demikian, telah banyak kajian akademik yang dilakukan untuk merumuskan berbagai dimensi keadilan yang sebagian besar relevan dengan konsep keadilan yang mendasari Transisi

Berkeadilan. Dimensi-dimensi keadilan tersebut, yang dijabarkan dibawah ini, sangat penting untuk dijelaskan agar dapat memberikan arah yang lebih baik dalam pengambilan kebijakan:

- **Keadilan Distributif :** Transisi Berkeadilan harus mendistribusikan secara adil biaya dan manfaat dari berbagai tindakan untuk melindungi seluruh kehidupan dari kekacauan iklim, dengan memberikan perhatian khusus kepada para pekerja (termasuk pekerja dalam rantai nilai bahan bakar fosil maupun sektor lain yang terdampak oleh kebijakan iklim, baik yang tergabung dalam serikat pekerja maupun yang berada dalam pekerjaan rentan, informal, serta pengangguran), rumah tangga miskin, komunitas, generasi muda, perempuan, dan penyandang disabilitas yang terdampak oleh peralihan dari sektor-sektor yang merusak iklim. Secara khusus, hal ini berarti bahwa negara-negara kaya, perusahaan besar, institusi militer, dan kelompok elite harus segera mulai meninggalkan model ekonomi linier yang bergantung pada eksploitasi sumber daya secara terus-menerus dan semakin meningkat. Sebagai gantinya, mereka perlu beralih ke model ekonomi sirkular, yaitu sistem ekonomi yang meminimalkan pengambilan sumber daya dan limbah, serta memastikan bahwa produk digunakan selama mungkin sesuai dengan masa pakainya.
- **Keadilan Prosedural:** Transisi Berkeadilan harus memastikan bahwa proses pengambilan keputusan yang mengarahkan jalannya transisi dilakukan secara inklusif dan adil, serta menjamin kepemilikan dan pengelolaan bersama atas sistem energi baru yang rendah karbon oleh para pemangku kepentingan komunitas dan para pemegang hak⁴. Pendekatan ini menuntut perubahan kelembagaan dan transformasi struktural dalam sistem, agar ketidakadilan distributif tidak kembali muncul di masa depan. Hal ini berarti bahwa Transisi Berkeadilan tidak hanya sekadar “memberikan kompensasi” kepada pihak-pihak yang terdampak, tetapi juga melakukan reformasi terhadap institusi itu sendiri. Selain itu, pendekatan ini juga mencakup penerapan berbagai bentuk tata kelola pemerintahan baru.
- **Keadilan Restoratif:** Transisi Berkeadilan harus mampu mengatasi kerusakan historis yang dialami individu, komunitas, lingkungan, dan kesehatan, dengan memberikan perhatian khusus pada upaya memperbaiki atau memulihkan kondisi masyarakat yang terjajah, terdampak, atau kehilangan hak-haknya, serta lingkungan yang berada dalam risiko. Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan—baik pemulihan manusia maupun lingkungan⁵. Dampak industri ekstraktif terhadap masyarakat dan wilayah sangat kompleks serta mencakup berbagai dimensi. Oleh karena itu, upaya pemulihan harus dilakukan secara interseksional dan menghormati kompleksitas tersebut.
- **Keadilan Antar Generasi:** Transisi Berkeadilan berlandaskan urgensi untuk melindungi seluruh kehidupan di planet ini agar generasi mendatang dapat hidup sehat dan sejahtera. Hal ini menuntut agar setiap langkah pengurangan emisi dan ekstraksi sumber daya, perlindungan keanekaragaman hayati, penghapusan bahan kimia berbahaya, serta pelestarian sumber daya air, dan lain-lain, didasarkan pada ilmu pengetahuan terbaru yang tersedia, serta dilaksanakan dengan kecepatan setinggi

⁴ JTRC, Mapping Just Transition(s) to a Low-Carbon World. UNRISD, RLS, ULIP

⁵ Presidential Climate Commission (2022). [A Presidential Climate Commission Report: A Framework For A Just Transition In South Africa.](#)

mungkin. Pada saat yang sama, diperlukan pula identifikasi sejak dini terhadap berbagai potensi risiko yang dapat ditimbulkan oleh proses transisi tersebut. Keadilan antargenerasi juga mencakup perubahan mendasar terhadap model ekonomi yang dominan, dari sistem ekonomi linear menuju sistem ekonomi sirkular, secepat mungkin.

Selain empat dimensi keadilan tersebut, terdapat elemen kelima yang berkaitan dengan tujuan transformasional dari Transisi Berkeadilan yang harus selalu menjadi perhatian utama:

- **Tujuan Transformasional :** Transisi yang Berkeadilan (Just Transition) mendorong pengembangan jalur-jalur alternatif yang menantang sistem ekonomi dominan. Pendekatan ini memadukan kebijakan jangka pendek dengan perspektif kritis terhadap sistem yang ada, sehingga memungkinkan munculnya praktik-praktik yang lebih setara dan memberikan kendali yang lebih besar kepada masyarakat lokal. Selain itu, pendekatan ini juga bertujuan memperkuat demokrasi yang lebih substansial, di mana bias dan ketidakadilan berdasarkan gender, ras, dan kelas sosial semakin berkurang. Tujuan transformasional dalam Transisi yang Berkeadilan memastikan bahwa proses transisi tidak hanya berfokus pada perubahan ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada upaya membongkar berbagai sistem penindasan yang telah mengakar dalam masyarakat kontemporer, seperti rasisme, patriarki, kelasisme, dan ableisme. Dengan demikian, Transisi yang Berkeadilan berupaya mewujudkan perubahan mendasar menuju masyarakat yang lebih inklusif, demokratis, setara, dan berkeadilan sosial.

3. Prinsip-prinsip yang memandu penerapan Transisi yang Berkeadilan: Unsur-unsur utama untuk proses dan rencana Transisi yang Adil dan Inklusif

Prinsip-prinsip yang diuraikan dalam bagian ini berasal dari pengalaman nyata serta upaya pengorganisasian yang dilakukan oleh masyarakat, organisasi masyarakat sipil, pekerja, dan pemegang hak lainnya yang telah lama memperjuangkan terwujudnya transisi yang benar-benar berkeadilan. Prinsip-prinsip panduan ini bukan sekadar gagasan abstrak, melainkan arahan praktis dan pertimbangan kelembagaan yang dapat membantu memastikan bahwa proses transisi berlangsung secara adil, partisipatif, dan efektif. Prinsip-prinsip ini mencerminkan praktik-praktik terbaik yang muncul dari berbagai konteks, serta berlandaskan pada keadilan, martabat manusia, dan perlindungan seluruh hak asasi manusia. Transisi Berkeadilan yang sesungguhnya harus dibangun melalui proses yang inklusif, transparan, dan demokratis, di mana kelompok-kelompok yang paling terdampak—seperti komunitas di garis depan, pekerja informal dan pekerja dengan kondisi kerja tidak menentu, perempuan dan kelompok dengan keragaman gender, serta penyandang disabilitas—memiliki kesempatan dan kewenangan untuk berperan dalam membentuk serta memimpin pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan dan masa depan mereka.

Bagian ini tidak dimaksudkan sebagai daftar yang lengkap, aturan yang harus diterapkan secara kaku, ataupun model yang berlaku untuk semua situasi. Sebaliknya, bagian ini merupakan

panduan yang memberikan arah berdasarkan pengalaman praktik di lapangan, dengan menyoroti unsur-unsur yang perlu dianggap penting dalam mewujudkan transisi yang adil dan inklusif. Prinsip-prinsip ini terbuka untuk diperkaya dan dikembangkan lebih lanjut melalui pengalaman serta pengetahuan baru dari berbagai pihak yang terlibat langsung dalam mendorong perubahan. Selain itu, prinsip-prinsip tersebut perlu terus disesuaikan dengan berbagai konteks yang berbeda agar benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjaga keberlanjutan bumi.

- Dirancang dan dilaksanakan di tingkat nasional, dengan tujuan menjamin kehidupan yang bermartabat bagi semua orang tanpa melampaui batas daya dukung bumi.
 - a. Menetapkan target nasional dan sektoral yang selaras dengan Persetujuan Paris (Paris Agreement) dan serta keputusan 1/CMA.4⁶ paragraf 51 mencakup berbagai jalur transisi yang meliputi aspek energi, sosial-ekonomi, ketenagakerjaan, dan dimensi terkait lainnya.
 - b. Mengutamakan kecukupan, efisiensi, dan ekonomi sirkular, serta menghindari pendekatan ekstraktivisme hijau (green extractivism) yang dapat menimbulkan tekanan berlebihan terhadap lingkungan, lahan, sumber daya alam, Masyarakat Adat, dan komunitas lokal.
- Dibangun dengan melibatkan pekerja, masyarakat, dan seluruh pemegang hak, serta didasarkan pada kondisi nyata, kebutuhan, dan masukan mereka.
 - c. Tersedianya lembaga, mekanisme konsultasi, dan proses partisipasi yang kuat dan inklusif dalam perencanaan serta pengambilan keputusan di tingkat nasional, regional, dan lokal. Di satu sisi, perlu ada dialog sosial tripartit yang melibatkan pemerintah, pemberi kerja, dan pekerja untuk menyusun kebijakan ketenagakerjaan. Di sisi lain, perlu ada pelibatan pemegang hak dan pemangku kepentingan terkait dalam seluruh aspek Transisi Berkeadilan.
 - d. Menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk hak-hak ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan; hak masyarakat keturunan Afrika dan Masyarakat Adat; hak-hak pekerja; hak atas kesehatan; hak penyandang disabilitas; hak generasi mendatang; hak kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya; serta hak atas pembangunan.
 - e. Menghormati hak Masyarakat Adat untuk memberikan persetujuan atas dasar informasi yang lengkap, diperoleh sebelumnya, dan tanpa paksaan (FPIC), serta memastikan bahwa semua masyarakat yang terdampak dikonsultasikan, memiliki akses untuk menyampaikan keluhan, dan mendapatkan kompensasi yang adil.
 - f. Melakukan penilaian dan identifikasi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara menyeluruh dan transparan, dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dan keragaman sosial secara terpadu, termasuk aspek gender, ras, etnis, kelas

⁶ Decision 1/CMA.4, adopted at COP27 as part of the Sharm el-Sheikh Implementation Plan:
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Decisions_1CMA4_1COP27.pdf

sosial, disabilitas, usia, tingkat pendapatan, dan faktor lainnya. Selain itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mencegah dan mengurangi dampak yang merugikan, disertai mekanisme pertanggungjawaban yang jelas serta pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan.

- Menciptakan kesejahteraan serta mengurangi, bukan memperdalam, ketimpangan yang ada.
 - g. Menjamin pekerjaan yang layak, perlindungan hak-hak pekerja, serta kehidupan yang aman dan bermartabat bagi semua orang, dengan melibatkan secara aktif seluruh kelompok pekerja dalam penyusunan rencana transisi. Hal ini mencakup pekerja formal dan informal, pekerja dan pelaku ekonomi rakyat, perempuan, kelompok dengan keragaman gender, pekerja muda, pekerja lanjut usia, serta pekerja di sektor perawatan dan pekerjaan domestik.
 - h. Menyediakan program dan kebijakan perlindungan sosial yang bersifat universal, responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, dan mendorong kesetaraan gender, dengan memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Prioritas utamanya adalah membangun sistem perlindungan sosial dasar yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
 - i. Menempatkan ekonomi perawatan (care economy) sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan Transisi Berkeadilan. Hal ini mencakup pengakuan, penataan ulang, dan pembagian yang lebih adil terhadap pekerjaan perawatan dan pengasuhan yang mendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, yang selama ini sebagian besar dilakukan oleh perempuan, baik di tingkat kebijakan, kelembagaan, maupun rumah tangga.
 - j. Pemerintah menyediakan layanan publik yang berkualitas sebagai bagian dari kewajibannya untuk memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, seperti hak atas energi berkelanjutan, pangan, pendidikan, layanan kesehatan, perumahan, air bersih, dan sanitasi. Selain itu, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang mendukung kedaulatan pangan, yaitu kemampuan masyarakat dan negara untuk menentukan sistem pangan mereka sendiri secara berkelanjutan dan adil.
- Menjelaskan peran kerja sama internasional sebagai instrumen penting untuk menciptakan kondisi yang mendukung terwujudnya Transisi Berkeadilan di semua negara, termasuk melalui
 - k. Penyediaan pendanaan iklim yang tidak menambah beban utang untuk mendukung penerapan prinsip-prinsip di atas, khususnya bagi negara-negara yang memiliki keterbatasan kapasitas untuk melaksanakannya.
 - l. Pengembangan bentuk-bentuk baru investasi dan perjanjian perdagangan yang tidak lagi didasarkan pada hubungan yang tidak setara, eksploitatif, dan/atau bercorak neokolonial. Langkah-langkah ini harus menjamin persyaratan perdagangan yang adil, mencegah praktik eksploitasi, serta menjunjung tinggi

hak-hak pekerja dan hak asasi manusia lainnya, termasuk hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti hak atas kesehatan, serta standar lingkungan. Dengan demikian, dapat tercipta sistem perdagangan global yang lebih seimbang, adil, dan inklusif.

- m. Mempermudah akses yang luas bagi negara-negara di Global South (negara-negara berkembang) terhadap energi terbarukan dan teknologi terkait iklim lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
- n. Mendukung negara-negara berkembang untuk mengembangkan perekonomian mereka, membangun model ekonomi alternatif, serta memperkuat kepemilikan dan kapasitas produksi dalam negeri, sehingga tidak bergantung pada pihak luar dalam proses pembangunan ekonomi dan transisi.

4. Dari Prinsip ke Praktik: Kebijakan dan Tuntutan Apa yang Dapat Mewujudkannya?

Kebijakan **Transisi Berkeadilan (Just Transition)** saat ini dibahas di berbagai tingkat, mulai dari forum internasional dan multilateral hingga perencanaan di tingkat lokal maupun perusahaan. Salah satu acuan yang paling dikenal adalah pedoman yang dikembangkan oleh ILO, yang mencakup sembilan bidang kebijakan.⁷ Berikut disajikan ringkasan kebijakan yang bertujuan untuk menunjukkan berbagai tuntutan yang dapat diwujudkan melalui pendekatan Transisi Berkeadilan. Dalam proses ini, sangat penting untuk tetap menunjukkan solidaritas kepada kelompok-kelompok yang berada dalam situasi rentan akibat kebijakan aksi iklim. Kelompok tersebut mencakup pekerja dan serikat pekerja yang menuntut penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta hak-hak ketenagakerjaan dalam penyusunan strategi Transisi Berkeadilan, seperti kebebasan berserikat, hak untuk berunding secara kolektif, dan hak atas lingkungan kerja yang aman dan sehat. Selain itu, perhatian juga perlu diberikan kepada rumah tangga pedesaan dan masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak oleh kenaikan harga energi, serta kelompok rentan lainnya. Keterlibatan pekerja dan masyarakat dalam merancang strategi-strategi tersebut harus tetap menjadi bagian utama dari upaya kita. Hal ini penting karena suara mereka sering kali diabaikan ketika konsep Transisi Berkeadilan mulai dibahas dalam ruang-ruang pengambilan keputusan.

Pemahaman kita tentang Transisi Berkeadilan, yang didasarkan pada empat dimensi keadilan—keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan restoratif, dan keadilan antargenerasi—serta tujuan untuk mendorong perubahan yang mendasar dalam masyarakat, perlu diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan nyata yang diterapkan di lapangan. Sebagai contoh, kebijakan pelatihan ulang keterampilan (re-skilling) dapat sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut apabila memberikan perhatian lebih kepada mereka yang menghadapi kesulitan lebih besar dalam memperoleh pekerjaan baru (keadilan distributif), dirancang bersama oleh pekerja dan anggota masyarakat yang terdampak secara kolektif (keadilan prosedural), mempertimbangkan serta

⁷ International Labour Organization (2016). [Guidelines for a Just Transition towards environmentally sustainable economies and societies for all](#)

memperbaiki dampak ketidakadilan atau penindasan yang pernah terjadi di suatu wilayah (keadilan restoratif), diarahkan pada kegiatan yang memulihkan dan melindungi lingkungan serta seluruh makhluk hidup (keadilan antargenerasi), serta bertujuan menciptakan ekonomi masyarakat yang lebih beragam melalui bentuk-bentuk organisasi dan pembagian manfaat yang lebih adil.

Memahami Transisi Berkeadilan membutuhkan kemampuan untuk membayangkan transformasi di masa mendatang serta menghubungkan kebutuhan praktis masyarakat saat ini dengan berbagai peluang yang dapat berkembang di masa mendatang. Kebijakan-kebijakan berikut merupakan syarat dasar bagi terwujudnya Transisi Berkeadilan. Selain itu, perlu ditambahkan berbagai elemen pendukung yang dapat memperkuat pelaksanaannya agar sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

a. Pekerja

- Menciptakan peluang kerja alternatif yang layak serta mendukung inisiatif usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pekerja, dengan memastikan akses yang setara bagi kelompok-kelompok yang selama ini kurang mendapat perhatian, termasuk penyandang disabilitas.
- Mewajibkan perusahaan untuk menyediakan program mobilitas kerja dan pelatihan ulang di tempat kerja untuk membantu para pekerja mengisi posisi-posisi baru. Program-program ini perlu dimasukkan ke dalam atau diperkuat melalui perjanjian kerja bersama antara perusahaan dan serikat pekerja.
- Meningkatkan kondisi dan lingkungan kerja agar lebih aman, sehat, dan layak bagi para pekerja.
- Menyediakan akses terhadap pelatihan keterampilan dan peningkatan keterampilan baru (re-skilling), terutama di sektor-sektor yang ramah lingkungan. Dalam pelaksanaannya, perlu diperhatikan dukungan finansial bagi pekerja selama masa pelatihan serta keterjangkauan biaya pelatihan. Pelatihan keterampilan tidak boleh menggantikan akses yang menyeluruh terhadap pendidikan tinggi atau pendidikan lanjutan setelah sekolah menengah.
- Menyediakan akses terhadap peluang kerja yang dapat diperoleh dalam waktu dekat, termasuk melalui penciptaan lapangan kerja di sektor publik.
- Menyediakan program pensiun dan kompensasi yang layak, termasuk bagi pekerja yang tidak dapat mengikuti pelatihan ulang atau meningkatkan keterampilan untuk beralih ke pekerjaan lain.

Panduan Transisi Berkeadilan: Menuju Jalur Transisi Energi Berkeadilan serta Masa Depan yang Inklusif dan Berkelanjutan.

b. Masyarakat

- Memberikan dukungan kepada masyarakat untuk merancang dan memperoleh akses terhadap mata pencaharian alternatif serta peluang sosial dan ekonomi, termasuk pengembangan usaha sosial (social enterprises) dan kepemilikan usaha oleh masyarakat.
- Mengidentifikasi sejak dini anggota masyarakat dan layanan yang berisiko terdampak akibat proses transisi, tidak hanya pekerja langsung maupun tidak langsung, tetapi juga pekerja informal serta layanan publik seperti sekolah dan penyedia layanan kesehatan.
- Memastikan fokus awal pada pemulihan, rehabilitasi, dan perbaikan kondisi lingkungan serta kesehatan masyarakat yang terdampak.
- Memprioritaskan pembongkaran fasilitas atau unit yang mencemari lingkungan daripada mempertahankan kapasitas yang tidak digunakan, sehingga lahan dapat dibebaskan untuk investasi baru dan membuka peluang kerja, termasuk dalam proses penonaktifan dan pembersihan lokasi.
- Mendukung pembangunan infrastruktur penting di wilayah-wilayah yang ditentukan oleh masyarakat, seperti internet dan transportasi publik, agar kelompok yang selama ini kurang terlayani dapat memperoleh manfaat dari transisi energi.
- Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki sumber daya yang mereka kembangkan serta ikut menentukan pengelolaannya, termasuk sumber daya intelektual, bahan yang dapat didaur ulang, sistem pangan, sumber daya air, hutan, dan lainnya.
- Mempertimbangkan dampak terhadap pendapatan rumah tangga miskin dan/atau pedesaan, khususnya terkait akses dan keterjangkauan harga energi serta kebutuhan mobilitas.

c. Kebijakan Publik di Tingkat Nasional

Transisi Berkeadilan dapat berjalan lebih baik dan didanai secara lebih efektif jika dipandu oleh rencana yang menyeluruh di tingkat nasional. Rencana tersebut, antara lain, harus mengakui pentingnya penghentian bertahap penggunaan bahan bakar fosil serta transformasi sistem pangan menuju pendekatan agroekologi yang tidak berbasis pada eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Percepatan inisiatif di lapangan untuk mewujudkan Transisi Berkeadilan juga sangat diperlukan.

Rencana Transisi Berkeadilan harus dipandu oleh prinsip-prinsip keadilan yang telah dijelaskan sebelumnya serta target yang ambisius yang menjaga kita tetap berada dalam batas-batas daya dukung dan keseimbangan sistem Bumi (planetary boundaries). Hal ini mencakup rencana penghentian penggunaan bahan bakar fosil, penghentian penggundulan hutan, peralihan dari pertanian intensif dan industri menuju sistem pangan yang menjamin ketahanan pangan dan gizi, berbasis agroekologi serta konsumsi daging yang lebih sedikit dan lebih berkualitas, pendekatan

ekonomi sirkular yang mendorong penggunaan kembali, daur ulang, dan desain ramah lingkungan, serta langkah-langkah untuk beralih dari bentuk ekstraktivisme lainnya—seperti kegiatan pertambangan, termasuk ekstraksi mineral yang digunakan untuk mendukung transisi energi.

- Pembentukan dan penerapan dialog sosial serta mekanisme pengambilan keputusan lainnya yang memastikan keterlibatan kelompok yang kurang dilibatkan (pekerja dan masyarakat terdampak).
- Antisipasi kebutuhan transisi sejak dini, termasuk identifikasi wilayah-wilayah yang membutuhkan dukungan tambahan atau segera, serta penggunaan alat penilaian dampak untuk memperjelas kelompok masyarakat yang paling terdampak oleh perubahan tersebut.
- Pendekatan pembangunan ekonomi regional yang menyeluruh untuk menciptakan solusi jangka pendek dan jangka panjang bagi masyarakat lokal yang terdampak, termasuk peralihan dari ekonomi linier menuju ekonomi sirkular.
- Penguatan sistem perlindungan sosial, seperti bantuan pengangguran, jaminan kecelakaan kerja, tunjangan sakit, perlindungan kesehatan, pensiun hari tua, bantuan anak dan keluarga, perlindungan kehamilan, pensiun disabilitas, dan pensiun bagi penyintas, terutama bagi kelompok yang rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, serta mereka yang bekerja di sektor informal.
- Pembentukan dana untuk mendukung Transisi Berkeadilan.
- Pemilik usaha atau industri yang menghasilkan polusi wajib menanggung biaya pemulihan dan berinvestasi di wilayah yang terdampak.
- Pemilik aset yang menghasilkan emisi karbon tinggi atau yang akan dihentikan bertahap harus ikut menanggung kerugian, karena jika kompensasi hanya dibebankan kepada industri melalui uang pajak, maka beban akan ditanggung oleh masyarakat dan mengurangi sumber daya untuk aspek transisi lainnya.⁸

d. Tata Kelola

- Rencana pengembangan investasi di masa depan harus diputuskan melalui proses yang transparan, terbuka, dan partisipatif, dengan melibatkan pekerja dan serikat pekerja mereka, anggota masyarakat yang terdampak di atau sekitar lokasi proyek (termasuk Masyarakat Adat), organisasi perempuan dan pemuda, penyandang disabilitas, serta kelompok masyarakat rentan lainnya seperti pekerja informal atau pekerja tidak tetap.
- Proses yang terbuka dalam mengakses pendanaan untuk proyek skala kecil dan menengah, termasuk proyek energi terbarukan yang dimiliki dan dikelola secara terdesentralisasi oleh komunitas atau pekerja.

⁸ Atteridge, A., Blanco, I. and Strambo, C. (2020). [Insights from Historical Cases of Transition: Background Paper for the EBRD Just Transition Initiative](#). European Bank for Reconstruction and Development.

Panduan Transisi Berkeadilan: Menuju Jalur Transisi Energi Berkeadilan serta Masa Depan yang Inklusif dan Berkelanjutan.

- Proses yang transparan dan melibatkan konsultasi dalam pemberian pendanaan untuk proyek skala besar, dengan memastikan perlindungan sosial dan lingkungan yang memadai. Untuk proyek yang berdampak pada Masyarakat Adat, termasuk yang berada di atau dekat wilayah mereka, harus menjunjung tinggi hak atas Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Free, Prior, and Informed Consent/FPIC) sepanjang seluruh siklus proyek, termasuk hak untuk menolak proyek pada setiap tahap pengembangannya. FPIC juga merupakan praktik terbaik dalam melibatkan masyarakat.
- Pendanaan diberikan dalam bentuk hibah atau pembiayaan tanpa bunga, bukan dalam bentuk pinjaman.
- Proses yang transparan dan melibatkan konsultasi dalam pemberian pendanaan untuk proyek skala besar
- Kewajiban uji tuntas hak asasi manusia yang sesuai dengan pedoman dan hukum internasional, untuk memastikan adanya perlindungan sosial dan lingkungan dalam setiap proyek.
- Penetapan tanggung jawab yang jelas antara berbagai pihak berwenang, serta memastikan suara pekerja dan masyarakat benar-benar diwakili dalam berbagai tahap proses pengambilan keputusan.

e. Kerja sama Utara/Selatan

Dimensi dalam pembahasan Transisi Berkeadilan ini belum mendapatkan perhatian yang sebanding dengan tingkat nasional, lokal, dan sektoral. Perlu dipahami bahwa pekerjaan dan mata pencaharian jutaan orang di seluruh dunia masih terikat pada sistem ekonomi ekstraktif. Namun, sementara di beberapa wilayah pemerintah memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengelola perubahan pada sektor-sektor ekstraktif utama, di banyak wilayah lain—sering kali karena warisan kolonial atau bentuk neokolonialisme, serta tekanan politik dari kelompok elite—sumber daya yang diperlukan tidak tersedia.

Peralihan dari sistem ekstraktif membutuhkan gelombang baru kerja sama multilateral dan solidaritas internasional, untuk mencegah penerapan standar ganda yang dapat kembali menjadikan masyarakat dan negara tertentu sebagai zona pengorbanan. Hal ini juga membutuhkan pendekatan yang berani dalam pendanaan Transisi Berkeadilan.

Upaya yang terus dilakukan oleh CAN terkait pentingnya reformasi sistem keuangan global yang lebih adil dan setara untuk mendukung Transisi Berkeadilan⁹ bersama dengan berbagai upaya yang dilakukan melalui Perjanjian Penghentian dan Pembatasan Bahan Bakar Fosil (Fossil Fuel Non Proliferation Treaty¹⁰), memberikan kontribusi penting dalam merumuskan bentuk kerja sama antarnegara yang dapat mendukung terwujudnya Transisi Berkeadilan.

⁹ CAN International (2023). [7.Join Principles For Finance System Transformation.](#)

¹⁰ [Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty](#)

Beberapa keputusan berikut yang dapat membuka jalan agar Transisi Berkeadilan benar-benar terwujud:

- Tersedianya pendanaan internasional untuk Transisi Berkeadilan, demi mendukung pemerintah yang berkomitmen untuk melakukan transisi dari ekonomi ekstraktif, dengan fokus awal pada penghentian bertahap penggunaan bahan bakar fosil, sehingga masyarakat dan pekerja dapat didampingi melalui kebijakan-kebijakan yang telah disebutkan sebelumnya.
- Perlu dijamin bahwa pendanaan tersebut benar-benar baru dan tambahan, yaitu tidak berasal dari dana bantuan pembangunan yang sudah ada (ODA), sehingga tidak mengurangi anggaran untuk prioritas pembangunan lain yang juga penting dan adil. Sumber dana ini dapat berasal dari pungutan terhadap industri bahan bakar fosil, karena industri tersebut memiliki tanggung jawab besar dalam terjadinya krisis ini. Selain itu, dana juga dapat diperoleh melalui penghapusan utang serta mekanisme global yang lebih transparan dan demokratis untuk menangani utang yang tidak berkelanjutan dan tidak sah. Langkah-langkah ini dapat membantu mencegah memburuknya krisis utang, memberikan ruang keuangan bagi negara untuk mengembangkan ekonomi yang lebih beragam, dan mendukung terwujudnya Transisi Berkeadilan¹¹.
- Akses terhadap hak kekayaan intelektual atas teknologi yang ramah lingkungan dapat membantu memperkuat kemampuan industri di negara-negara yang sangat membutuhkan pilihan untuk mengembangkan dan memperluas ekonomi mereka.
- Perlakuan khusus bagi produk ekspor dari negara-negara yang sedang berusaha mengembangkan dan mendiversifikasi ekonominya juga perlu dipertimbangkan lebih lanjut,
- Penghapusan atau pengurangan utang yang dimiliki oleh lembaga-lembaga seperti IMF dan Bank Dunia, yang dianggap berasal dari sistem kolonial, juga perlu dipertimbangkan.

Sekali lagi, bagian ini tidak dimaksudkan untuk menyajikan daftar kebijakan atau langkah-langkah yang lengkap maupun bersifat mengikat. Sebaliknya, bagian ini menawarkan sejumlah arahan praktis dan hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk membantu penyusunan dan pelaksanaan rencana Transisi Berkeadilan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dalam banyak kasus, aspek-aspek penting seperti partisipasi masyarakat, keadilan, pekerjaan perawatan dan pengasuhan (care work), inklusi penyandang disabilitas, serta kepemilikan dan pengelolaan oleh masyarakat lokal sering kali terabaikan atau kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan pertimbangan teknis maupun ekonomi yang lebih dominan. Usulan dan tuntutan yang dihimpun dalam dokumen ini berasal dari berbagai praktik baik yang didasarkan pada pengalaman komunitas yang berada di garis depan, gerakan akar rumput, organisasi masyarakat sipil, serta para pekerja yang secara aktif terlibat dalam mendorong proses transisi di lapangan. Kebijakan dan praktik-praktik baik ini tidak seharusnya dipandang sebagai model yang tetap atau harus diikuti secara persis. Sebaliknya, kebijakan dan praktik ini perlu dipahami sebagai referensi yang terus berkembang, disesuaikan, diperluas, dan disempurnakan melalui kontribusi

¹¹ CSO Equity Review (2021). [A Fair Shares Phase Out: A Civil Society Equity Review on an Equitable Global Phase Out of Fossil Fuels](#).

Panduan Transisi Berkeadilan: Menuju Jalur Transisi Energi Berkeadilan serta Masa Depan yang Inklusif dan Berkelanjutan.

berkelanjutan dari mereka yang paling terdampak dan terlibat langsung dalam mewujudkan transisi yang benar-benar berkeadilan.

5. Refleksi Akhir: Menuju rencana transisi energi berkeadilan yang inklusif dan berpihak pada masyarakat

Panduan ini disusun untuk mendukung upaya bersama dalam merancang proses dan rencana Transisi Energi Berkeadilan (Just Energy Transition/JET) yang adil bagi masyarakat, ramah lingkungan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi pekerja, komunitas, serta pihak-pihak terkait lainnya. Panduan ini juga dapat menjadi acuan bagi proses transisi yang adil di sektor lain yang sedang mengalami perubahan. Panduan ini bukanlah aturan yang harus diikuti secara kaku. Sebaliknya, isinya merupakan kumpulan praktik baik, pengalaman, pelajaran yang diperoleh, serta komitmen bersama yang lahir dari berbagai pengalaman nyata, gerakan masyarakat, dan penerapan di berbagai tempat dan situasi. Selain itu, panduan ini bertujuan untuk membantu menciptakan partisipasi yang lebih bermakna dalam proses Dialog Sosial. Dokumen ini menjelaskan bagaimana semua pemangku kepentingan, terutama kelompok yang selama ini kurang dilibatkan atau terpinggirkan, dapat dan perlu ikut menentukan arah transisi melalui proses pengambilan keputusan yang terbuka, inklusif, dan menghormati hak-hak semua pihak. Dalam keseluruhan dokumen ini, ditekankan bahwa kebijakan transisi energi tidak hanya harus mendukung pencapaian target iklim, tetapi juga menjaga martabat manusia, menciptakan pembagian manfaat dan kekuasaan yang lebih adil, serta membangun sistem yang lebih demokratis dan setara. Dengan menggabungkan berbagai pengetahuan dan menempatkan prinsip keadilan sebagai dasar dalam setiap proses dan hasil yang dicapai, panduan ini diharapkan dapat menginspirasi serta membantu masyarakat, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil dalam menyusun rencana JET yang berlandaskan partisipasi, solidaritas, dan keberlanjutan jangka panjang.

Panduan Transisi Berkeadilan: Menuju Jalur Transisi Energi Berkeadilan serta Masa Depan yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Anderson, T. (2019). [Principles for a Just Transition in Agriculture](#). ActionAid.
- Athanasiou T., Holz C., Kartha S. (2022). [Fair Shares: Lessons From Practice, Thoughts on Strategy](#)
- Atteridge, A., Blanco, I. and Strambo, C. (2020). [Insights from Historical Cases of Transition: Background Paper for the EBRD Just Transition Initiative](#). European Bank for Reconstruction and Development.
- CAN International (2023). [7 Join Principles For Finance System Transformation](#).
- Climate Justice Alliance. [Just Transition: A Framework for Change](#).
- CSO Equity Review (2021). [A Fair Shares Phase Out: A Civil Society Equity Review on an Equitable Global Phase Out of Fossil Fuels](#).
- International Labour Organization (2016). [Guidelines for a Just Transition towards environmentally sustainable economies and societies for all](#)
- [Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty](#)
- Just Transition Research Collaborative (2018). [Mapping Just Transition\(s\) to a Low-Carbon World](#). UNRISD, RLS, ULIP.
- Presidential Climate Commission (2022). [A Presidential Climate Commission Report: A Framework For A Just Transition In South Africa](#).

*Pilihan singkat sumber daya tambahan:**

**ini merupakan daftar sumber daya yang tidak lengkap yang dibagikan oleh anggota CAN dan mitra*

Keadilan:

- Muttitt, G. & Kartha, S. (2020). [Equity, climate justice and fossil fuel extraction: principles for a managed phase out](#), Climate Policy, 20:8, 1024-1042.
- Civil Society Equity Review. (2021). [A Fair Shares Phase Out: A Civil Society Equity Review on an Equitable Global Phase Out of Fossil Fuels](#). CSO Equity Review Coalition.

Panduan Transisi Berkeadilan: Menuju Jalur Transisi Energi Berkeadilan serta Masa Depan yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Kesehatan:

- Health and Climate Network (2022). [A Just Energy Transition for a healthy fossil fuel free world](https://healthandclimatenetwork.org/a-just-energy-transition-for-a-healthy-fossil-fuel-free-world/) <https://healthandclimatenetwork.org/a-just-energy-transition-for-a-healthy-fossil-fuel-free-world/>
- Narayan, S. (2022). [Just Transition For Healthy People On A Healthy Planet](#). Health Care Without Harm.

Prinsip dan visi dari berbagai belahan dunia:

- CAN Europe (2021). [Vision Document: Just Transformation: guiding just transitions for an inclusive, sustainable and resilient society](#).
- Climate Justice Alliance. [Just Transition: A Framework for Change](#)
- Finnwatch (2023). [Principles for Just Ecological Transition](#).
- Indigenous Environmental Network. [Indigenous Principles of Just Transition](#).
- Rabí,V., Pino, F., Fontecilla, F. (2021) [Transición Justa en Latinoamérica: De la Transición a la Transformación](#). Proyecto Transición Justa en Latinoamérica (TJLA), coordinado por ONG CERES, CEUS Chile, y ONG FIMA.
- USCAN. [Vision For Equitable Climate Action - Just Transition](#).
- WEDO. (2018). [Discussion Paper: Gender Equality & Just Transition](#)

Cuplikan dari berbagai belahan dunia: :

- CAN Europe (2021). [How To Maximise The Social Benefits Of Climate Action](#).
- CAN Europe (2023). [Fossil Fuel Subsidies in the EU](#).
- CarbonCare InnoLab. (2022). [Hong Kong Just Transition Report: Building Partnerships to Achieve a Climate Just City](#).
- Civil Society Equity Review - Extractives report (2023) <https://www.equityreview.org/extraction-equity-2023>
- Duriez, C., Hallak, J.(2022). Emplois & Climate. [Relever le défi des reconversions: Le Cas du Charbon Français](#). Réseau Action Climat et Institut Veblen
- Environmental Defence Canada. (2021). [Steady Path: How A Transition To A Fossil-Free Canada Is In Reach For Workers And Their Communities](#).
- Gach, E. (2021). [Just Transition:Creating New Jobs for a Decarbonized Society](#). Kiko Network.
- Hulse, M. et al., (2023). [Proposals for the Canadian Just Transition Act](#).
- Sokona,Y., et al. (2023). [Just Transition A Climate, Energy And Development Vision For Africa](#).

Panduan Transisi Berkeadilan: Menuju Jalur Transisi Energi Berkeadilan serta Masa Depan yang Inklusif dan Berkelanjutan.

- Ukrainian NGOs. (2023). [Civil Society Position on Coal Mining Communities' Just Transition in the Post-War Recovery of Ukraine.](#)

Tentang Transisi Energi Berkeadilan:

- Business & Human Rights Resource Centre. [Transition Minerals Tracker.](#)
- CAN International safeguards position paper (2023) https://climatenetwork.org/wp-content/uploads/2023/09/CAN_Just-Renewables-Paper_September-2023.docx.pdf
- CAN International (2024) RET Tracker <https://climatenetwork.org/wp-content/uploads/2024/10/CAN-I-Renewable-Energy-Tracker-2024.pdf>
- Dante, D. et al. (2022). [Towards a Just Energy Transition: Implications for communities in lower- and middle-income countries.](#) Oxfam
- Oil Change International. (2021). [The Sky's Limit Africa: The Case For A Just Energy Transition From Fossil Fuel Production In Africa.](#)
- SACAN (2023). [Joint Civil Society Organisations in South Africa Statement on the Just Energy Transition Investment Plan.](#) South African CSOs.
- Sutton, A., Cognuck González, S., (2022). [A Young Person's Guide To Sustainable Energy.](#) UNICEF.
- Treadwell, K. et al. (2021). [WWF Discussion Paper Just Energy Transformation.](#) WWF
- Wemanya, A., Opfer, K. (2022). [Principles for Just Energy Transition Partnerships in the African Energy Context.](#) Germanwatch

Just Energy Transition in Coal Regions